



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



RENCANA STRATEGIS 2021-2026

Jalan Basuki Rahmat No.78 Gedung Graha Tepian
Samarinda 75112 Telp. (0541)739614, Fax.(0541)741286,
SMS Center : 08115843555
Web: www.dpmptsp.samarindakota.go.id,
Email: dpmptsp@samarindakota.go.id



SAMARINDA magnificent



DPMPTSP



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang maha esa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-nya, sehingga dapat menyelesaikan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Samarinda Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis DPMPTSP Kota Samarinda periode 2021-2026 merupakan acuan bagi DPMPTSP dalam menyelenggarakan pelayanan penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Rencana Strategis DPMPTSP Kota Samarinda periode 2021-2026 juga merupakan upaya penyatuan persepsi dan komitmen diantara internal baik itu unsur pimpinan maupun staf tentunya harus dapat dicapai secara bersama-sama.

Berbagai kebijakan, program maupun kegiatan yang disusun dalam Rencana Strategis DPMPTSP Kota Samarinda Tahun 2021-2026 diharapkan dapat meningkatkan kinerja DPMPTSP Kota Samarinda sebagai penyelenggara pelayanan penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan serta koordinasi dengan instansi teknis.

Sebagai bentuk perencanaan jangka menengah tentunya Rencana Startegis DPMPTSP Kota Samarinda dalam perjalanannya akan dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan yang bersifat tak terduga (*turbulence*). Untuk itu berbagai penyempurnaan baik program maupun kegiatan tentunya akan terus dilakukan yang disesuaikan dengan berbagai pengaruh tersebut baik pengaruh yang bersifat regulatif maupun bersifat konsekuensi yang harus dihadapi guna terus memaksimalkan berbagai produk perencanaan dengan kebutuhan nyata yang ada di masyarakat.

Akhirnya semoga Rencana Strategis DPMPTSP Kota Samarinda Tahun 2021-2026 ini dapat di implementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan terwujudnya good governance.

Samarinda, Mei 2021
KEPALA DINAS



[Handwritten Signature]
JUSARAMDHANA ALUS, SH. M.Si
NIP. 19711030 199403 1 002



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	7
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	7
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	10
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	11
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	16
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	18
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	18
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .	18
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi	19
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD	20
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis.....	21
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	22
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	22
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	24
5.1. Rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah	24
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	25
6.1. Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif	25
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	39
7.1. Indikator Perangkat Daerah yang Secara Langsung Menunjukkan Kinerja yang akan Dicapai Perangkat Daerah Dalam Lima Tahun Mendatang Sebagai Komitmen untuk mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD	39
BAB VIII PENUTUP	40
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Personel berdasarkan Eselon/Non Eselon.....	10
Tabel 2.2	Jumlah Personel berdasarkan Golongan	10
Tabel 2.3	Jumlah Personel Berdasarkan Tingkat Pendidikan	10
Tabel 2.4	Jumlah Sarana dan Prasarana Perkantoran.....	11
Tabel 2.5	Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMPTSP Kota Samarinda.....	12
Tabel 2.6	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DPMPTSP Kota Samarinda Tahun 2016-2020	15
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPMPTSP Kota Samarinda Tahun 2021-2026	22
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Tahun 2021-2026 DPMPTSP Kota Samarinda	29
Tabel 7.1	Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	39



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi DPMPPTSP Kota Samarinda 9



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengembangan Investasi dan Penanaman Modal Daerah di setiap Kota adalah salah satu bentuk kewenangan Pemerintah Daerah dalam mengurus dan mengatur urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Hal mana dimaksud telah ditetapkan didalam Undang–undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Undang–undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Sebagai pedoman dalam melaksanakan Kewenangan Daerah, Pemerintah Kota Samarinda menetapkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Walikota Samarinda Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda, dimana dijabarkan Tugas Pokok DPMPTSP Kota Samarinda adalah membantu Walikota melaksanakan urusan Pemerintahan konkuren bidang Penanaman Modal dan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan Rencana Strategis dan menyiapkan bahan koordinasi perumusan kebijakan Dinas.
2. Perumusan tujuan dan sasaran yang akan dicapai sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan.
3. Penyusunan Program kerja Tahunan Dinas dalam menyelenggarakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan Rencana Strategis Pemerintah Daerah.
4. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi rencana strategis, tujuan dan sasaran serta kerja sama, baik dalam negeri maupun luar negeri di Bidang Penanaman Modal.
5. Membantu Walikota dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas tertentu penyelenggaraan Pemerintahan di Bidang Penanaman Modal.
6. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
7. Pengendalian dan Pengawasan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas.



8. Pemantauan, evaluasi dan Pelaporan hasil pelaksanaan tugas Dinas kepada Walikota.
9. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional, dan
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Kewenangan atas dasar urusan Pemerintah di Bidang Penanaman Modal sebagaimana disebutkan diatas, tujuan utamanya adalah peningkatan dan pertumbuhan ekonomi di Daerah dengan sasaran pokok ialah menciptakan bangunan dasar bagi usaha Pelaksanaan Program Dan Rencana Pengembangan Investasi ke arah Pertumbuhan Iklim Dan Kerjasama Investasi di Daerah.

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda 2021 - 2026 berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan di bidang penanaman modal.

Untuk mencapai fungsi maka Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. Nilai investasi;
2. Nilai IKM.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal;
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
9. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus;
10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;



11. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah;
12. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
19. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
20. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Nomenklatur DPMPTSP;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;



25. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2020-2024;
27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025;
28. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2005-2025;
29. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
30. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda Tahun 2021 - 2026 untuk menyiapkan dokumen perencanaan sebagai pedoman/penuntun yang dapat memberikan gambaran kondisi yang akan dicapai, arah kebijakan, strategi yang diambil untuk mencapai sasaran dalam kerangka pencapaian visi dan misi, sebagai tolak ukur pertanggungjawaban Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda pada setiap akhir tahun dalam kurun waktu 5 tahun kedepan dalam upaya pengembangan investasi penanaman modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu di Kota Samarinda.

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda Tahun 2021 - 2026 bertujuan sebagai berikut :

1. Sebagai acuan dalam perencanaan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda Tahun 2021 - 2026, sehingga setiap tahapan perencanaan pembangunan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan.



2. Memberikan arahan kebutuhan program dan kegiatan prioritas yang jelas hingga pelaksanaan kegiatan bisa terwujud secara efektif, efisien dan optimal.
3. Memudahkan pemahaman seluruh jajaran Manajemen dan Aparatur dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda Tahun 2021-2026 dalam melaksanakan kegiatan secara terarah, terpadu dan terukur untuk mencapai tujuan sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.
4. Sebagai instrumen tolak ukur dan kendali untuk mengevaluasi/penilaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda untuk masa periode tahun 2021 - 2026.
5. Sebagai dasar komitmen bersama seluruh jajaran aparatur di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda terhadap program-program yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dalam rangka mencapai visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih di Kota Samarinda.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda Tahun 2021 - 2026 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 sebagai berikut :

- Bab I : **PENDAHULUAN** terdiri dari latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan
- Bab II : **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**, menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi Perangkat Daerah, sumber daya Perangkat Daerah, kinerja pelayanan Perangkat Daerah, tantangan dan peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.
- Bab III : **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**, menyajikan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra



- K/L dan Renstra Provinsi, Telaahan Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD, serta penentuan isu-isu strategis
- Bab IV : **TUJUAN DAN SASARAN**, menguraikan tentang Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.
- Bab V : **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**, berisi Rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah
- Bab VI : **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**, berisi Rencana Program dan Kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.
- Bab VII **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**, berisi Indikator Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
- Bab VIII : **PENUTUP** merupakan penutup dari dokumen rencana strategis dan harapan kepada semua pihak yang berkepentingan agar menjadikan renstra ini sebagai penunjuk arah dan pedoman untuk melaksanakan pembangunan periode 2021-2026



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Samarinda yaitu Melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perijinan terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a.) Perumusan kebijakan teknis di bidang perijinan secara terpadu sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
- b.) Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang perijinan secara terpadu.
- c.) Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang pendataan dan penetapan.
- d.) Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang pelayanan perijinan.
- e.) Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang pengendalian dan pengawasan.

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda sesuai dengan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 40 Tahun 2016 terdiri dari :

1. Kepala Dinas ;
2. Sekretariat, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Perencanaan Program;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Investasi, membawahkan :
 - a. Seksi Kajian Calon Investor;
 - b. Seksi Pengkajian Potensi Investasi; dan
 - c. Seksi Evaluasi Investasi.

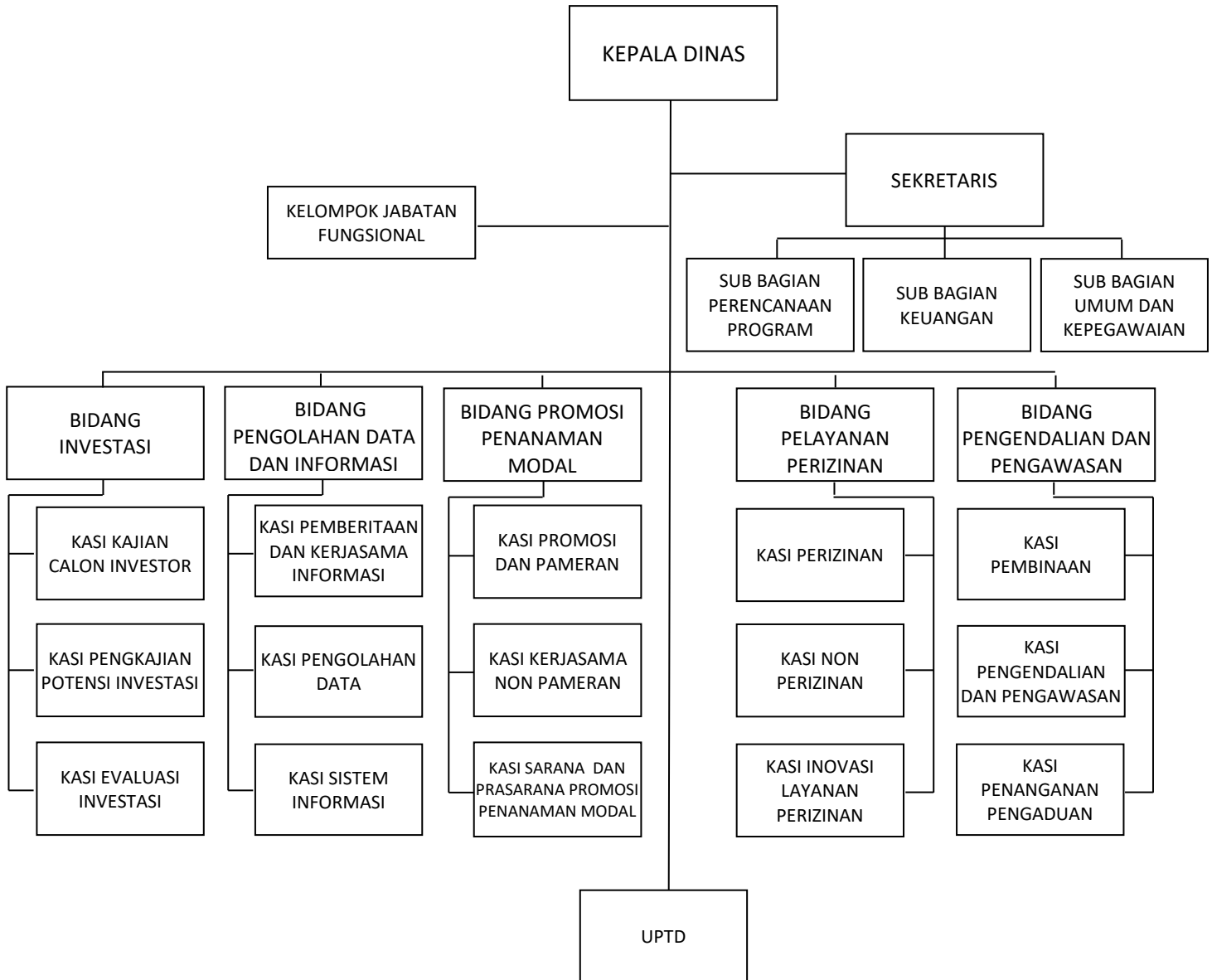


4. Bidang Pengolahan Data Informasi, membawahkan :
 - a. Seksi Pemberitaan dan Kerjasama Informasi;
 - b. Seksi Pengolahan Data; dan
 - c. Seksi Sistem Informasi.
5. Bidang Promosi Penanaman Modal, membawahkan :
 - a. Seksi Promosi dan Pameran;
 - b. Seksi Kerjasama Non Pameran; dan
 - c. Seksi Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal.
6. Bidang Pelayanan Perizinan, membawahkan :
 - a. Seksi Perizinan;
 - b. Seksi Non Perizinan; dan
 - c. Seksi Inovasi Layanan Perizinan.
7. Bidang Pengendalian dan Pengawasan, membawahkan :
 - a. Seksi Pembinaan;
 - b. Seksi Pengendalian dan Pengawasan; dan
 - c. Seksi Penanganan Pengaduan.
8. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
9. UPTD.



Gambar 2.1.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KOTA SAMARINDA**





2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Sumber Daya Manusia / Kepegawaian

Dalam Rangka menjalankan kegiatan administrasi dan operasionalnya, DPMPTSP Kota Samarinda sudah didukung oleh aparatur pelayanan penanaman modal dengan jumlah personil sebanyak 121 orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1

Jumlah personil berdasarkan Eselon / Non Eselon

No.	Eselon / Non Eselon	Jabatan	Jumlah
1	Eselon II b	Kepala Badan	1 Orang
2	Eselon III a	Sekretaris	1 Orang
3	Eselon III b	Kepala Bidang	5 Orang
4	Eselon IV a	Kasubbag & Kasi	18 Orang
5	Non Eselon	Staf	48 Orang
Jumlah Keseluruhan			73 Orang

Tabel 2.2

Jumlah personil Berdasarkan Golongan

No.	Eselon / Non Eselon	Jumlah
1	Golongan IV	8 Orang
2	Golongan III	44 Orang
3	Golongan II	20 Orang
4	Golongan I	1 Orang
Jumlah Keseluruhan		73 Orang

Tabel 2.3

Jumlah personil Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	Sarjana (S2)	11 Orang
2	Sarjana (S1)	66 Orang
3	Diploma (D3/D2)	3 Orang
4	SMA/SMK/MAN	40 Orang
5	SMP	1 Orang
Jumlah Keseluruhan		121 Orang

Aparatur pada DPMPTSP Kota Samarinda terdiri dari 73 PNS, sedangkan sisanya sebanyak 48 dari Non PNS merupakan Tenaga Honorer/ PTTB dan PTHH.



2.2.1. Sarana dan Prasarana Perkantoran

Untuk mendukung pelaksanaan kinerja, DPMPPTSP Kota Samarinda memiliki sarana dan prasarana sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.4

Jumlah Sarana dan Prasarana Kerja

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah
1	Mesin Fotocopy canon /IR 2420L	Unit	1
2	Mesin Penghacur Kertas	Unit	5
3	Meja Kayu	Buah	103
4	Kursi staf	Buah	124
5	Handy Cam	Unit	1
6	PC Unit	Unit	85
7	Note Book/Laptop	Unit	15
8	Harddisk Eksternal 1 TB	Unit	2
9	Printer	unit	53
10	Scanner A0	Unit	1
11	UPS	Unit	76
12	Mesin Antrian	Unit	1
13	Tv Monitor Antrian	Unit	1
14	Komputer Server	Unit	1
15	Kendaraan Operasional Roda 4	Unit	8
16	Kendaraan Operasional Roda 2	Unit	8
17	Software Aplikasi Perizinan	Unit	1
18	GPS	Buah	6
19	LCD Proyektor	Unit	3
20	Kamera Digital	Buah	4

Secara umum, untuk saat ini Sumber Daya Aset yang dimiliki oleh DPMPPTSP Kota Samarinda, sudah memadai dan memenuhi Standar Pelayanan Publik untuk pelayanan penanaman modal dan pelayanan perizinan.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda merupakan Organisasi Perangkat Daerah penyelenggara Pelayanan Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara terpadu dengan komitmen memberikan Pelayanan Prima sesuai dengan moto layanan “CERIA” yaitu Cepat, Efektif, Ramah, Inovatif, dan Amanah.

Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) terinci pada tabel dibawah ini :



Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target IKK	Target Renstra SKPD Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke				
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Indikator Makro																	
1	Nilai Investasi	Realisasi Nilai Investasi	7,9 T	9 T	9,3 T	9,6 T	9,9 T	1,6 T	7,05 T	8,1 T	10,4 T	930 M	0,2	0,7	0.8	1.08	0.09
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai Survei Indeks Kepuasan Masyarakat	88	89	90	90,5	91	87,1	90,3	92,2	90,9	88,2	0.9	1.01	1.02	1	0.9
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																	
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Tagihan rekening yang dibayarkan	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	1	1	1	1	1
2	Penyediaan Alat Tulis kantor	Jenis alat tulis kantor	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	1	1	1	1
3	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	1	1	1	1
4	Penyediaan Komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan	jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1
5	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1
6	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Persentase rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1	1	1	1	1



No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target IKK	Target Renstra SKPD Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke					
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	
7	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	PTT serta Pengelola Keuangan dan Barang yang dibayarkan honorariumnya.	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	1	1	1	1	1
Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur																		
1	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Persentase gedung milik sendiri/sewa yang dipelihara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	1	1	1	1
2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Persentase kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	1	1	1	1
3	Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan dan peralatan kantor	Persentase perlengkapan dan peralatan kantor yang dipelihara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	1	1	1	1
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan																		
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Renstra, Renja, RKT, IKU, RKA, AKIP, LAKIP)	Dokumen SAKIP	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	1	1	1	1	1
Program peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi																		
1	Promosi Investasi dalam wilayah Kalimantan Timur, Dalam dan Luar Negeri	Event Promosi Investasi	1	5	4	4	4	1	5	4	6	3	1	1	1	1,5	0,7	
2	Kerjasama Non Pameran Dalam dan Luar Negeri melalui Seminar, Konferensi, Lokakarya, dan Temu Usaha	Event Seminar, Konferensi, Lokakarya, Temu Usaha	0	0	0	1	1	0	0	0	3	1	0	0	0	3	1	



No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target IKK	Target Renstra SKPD Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke				
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi																	
1	Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan dan Penanaman Modal	Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1	1	1	1	1
2	Peningkatan Pelayanan dan Informasi Perijinan Daerah	Pemohon Izin yang dilayani	5000	5100	5200	5300	5400	5013	5184	5222	6427	4358	1	1	1	1,2	0,8
3	Pengembangan Potensi Unggulan dan Kajian Calon Investor	Dokumen Potensi Unggulan	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
4	Koordinasi, Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Investasi	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, monitoring, evaluasi Investasi	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan dan Sistem Informatika Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan di Kota Samarinda	Tersedianya Jaringan dan Sistem Informasi Penanaman Modal di Kota Samarinda	5	6	7	8	9	5	6	7	8	9	1	1	1	1	1
Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah																	
1	Penyusunan Peta Potensi Investasi Penanaman Modal di Kota Samarinda	Peta Potensi Investasi Penanaman Modal di Kota Samarinda	0	0	3	7	1	0	0	3	7	1	0	0	1	1	1



Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Samarinda Tahun 2016-2020

No	Uraian	Anggaran (Rp.000) Tahun ke					Realisasi Anggaran (Rp.000) Tahun ke					Persentase Realisasi Tahun ke				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.454.400	2.127.200	2.156.075	2.485.309	2.575.759	1.421.513	2.073.753	2.090.404	2.124.672	2.373.245	97,7	97,4	96,9	85,4	92,1
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	165.195	256.870	130.870	126.870	218.431	119.091	191.513	78.211	69.714	102.585	72,09	74,5	59,7	54,9	46,9
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	0	0	75.000	125.000	100.000	0	0	74.738	124.973	99.765	0	0	99,6	99,9	99,7
4	Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	175.000	503.500	500.000	734.000	884.000	175.000	503.500	483.851	717.317	823.784	100	100	96,7	97,7	93,1
5	Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah	0	0	291.922	553.000	200.000	0	0	280.888	526.581	121.011	0	0	96,2	95,2	60,5
6	Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	105.000	300.000	605.000	1.456.460	1.785.000	105.000	296.857	602.824	1.395.850	1.597.299	100	98,9	99,6	95,8	89,48



2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

2.4.1 Analisis Lingkungan Internal

Dari hasil observasi terhadap lingkungan internal Pemerintah Kota Samarinda, diperoleh suatu gambaran kondisi tentang kekuatan maupun kelemahan, sebagaimana dijelaskan berikut ini.

a) Kekuatan (Strengths)

1. Tupoksi dan kerjasama Instansi umumnya terdapat keterkaitan dalam mewujudkan investasi dan pemasaran komoditi/potensi;
2. Sumber Daya Manusia dilingkungan DPMPTSP mendukung peningkatan investasi dan promosi kerjasama investasi serta peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu;
3. Luas dan Kondisi Wilayah pemanfaatan investasi dan Penanaman Modal pada umumnya sangat terdukung.

b) Kelemahan (Weakness)

1. Database dan optimalisasi data link internet secara umum belum optimal;
2. Optimalisasi Program dan Kegiatan Penguatan kelembagaan dan Kinerja organisasi secara umum kurang terwujud;
3. Rancangan Revitalisasi dan Tata ruang Investasi/Penanaman Modal Belum terwujud;
4. Pencapaian program Peningkatan Iklim investasi, Pemasaran produk unggulan, pengembangan pajak dan perizinan, dan pengembangan budidaya dan produk komoditi/potensi investasi kurang terakses;
5. Penyiapan dan Penyusunan Kebijakan Pengembangan Investasi sangat lamban
6. Iklim dan Akses Pengembangan Kerjasama Investasi/Penanaman Modal secara umum kurang di dukung.

2.4.2 Analisis Lingkungan Eksternal

Dari hasil obervasi terhadap lingkungan Eksternal Pemerintah Kota Samarinda pada umumnya, diperoleh suatu gambaran kondisi tentang peluang maupun tantangan, sebagaimana dijelaskan berikut ini.

a) Peluang (Opportunities)



1. Kawasan-kawasan investasi dan lingkup organisasi bisnis di berbagai wilayah pada umum semakin bertambah dan mudah diakses;
2. Jaringan Kerjasama investasi dalam negeri semakin terbuka bagi PMA maupun PMDN dan pada umumnya dapat diakses;
3. Pertumbuhan Lembaga keuangan dan Bank semakin berkembang dan sangat menunjang;
4. Penerapan Jaringan komunikasi dan teknologi informasi semakin meluas dan berperan dalam dunia e-commers dan bisnis investasi;
5. Sumber Daya dan potensi alam dalam peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi;
6. Komitmen Pemerintah Kota Samarinda untuk terus berupaya meningkatkan Kepuasan Masyarakat dengan menyelenggarakan pelayanan perizinan yang mudah, murah, cepat, efektif, efisien, dan akuntabel.
7. Situasi keamanan dan ketertiban Kota Samarinda yang kondusif.

b) Tantangan (Threats)

1. Database dan optimalisasi data link internet secara umum belum terwujud;
2. Optimalisasi Program dan Kegiatan Penguatan kelembagaan dan Kinerja organisasi secara umum kurang terwujud;
3. Rancangan Revitalisasi dan Tataruang Investasi/Penanaman Modal Belum terwujud;
4. Pencapaian program Peningkatan Iklim investasi, Pemasaran produk unggulan, pengembangan pajak dan perizinan, dan pengembangan budidaya dan produk komoditi/potensi investasi kurang terakses;
5. Penyiapan dan Penyusunan Kebijakan Pengembangan Investasi sangat lamban
6. Iklim dan Akses Pengembangan Kerjasama Investasi/Penanaman Modal secara umum kurang di dukung.
7. Pelimpahan sebagian kewenangan perizinan yang belum utuh sehingga menghambat akuntabilitas pelayanan publik.
8. Kualitas Aparatur pelayanan perizinan yang perlu ditingkatkan, mengingat Peraturan mengenai perizinan selalu berubah mengikuti perkembangan zaman.
9. Sarana dan Prasarana yang perlu ditingkatkan demi peningkatan kualitas pelayanan.
10. Kondisi Pandemi Covid-19 yang menghambat pertumbuhan investasi di kota Samarinda.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh DPMPTSP Kota Samarinda adalah sebagai berikut:

1. Masih rendahnya minat Investor untuk berinvestasi di Kota Samarinda.
2. Belum optimalnya pelayanan penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan.

3.2. Telaah Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang sesuai dengan amanat UUD 1945, maka Pemerintah Daerah diharapkan dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, sebagai upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adapun Visi Walikota dan Wakil Walikota sebagai Kepala Daerah Terpilih dalam Pembangunan Kota Samarinda Tahun 2021 - 2026 adalah :

“ TERWUJUDNYA SAMARINDA SEBAGAI KOTA PUSAT PERADABAN ”

Dalam mewujudkan visi tersebut, akan ditempuh melalui 5 (lima) Misi Pembangunan Kota Samarinda Tahun 2021 - 2026, Yaitu :

1. Mewujudkan masyarakat madani (*civil society*) ditopang dengan sumberdaya manusia unggul, sehat jasmani dan rohani dalam kehidupan yang harmonis, egaliter serta relasi yang seimbang antar tiga pilar (masyarakat, negara dan swasta)
2. **Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dan masyarakat yang ditandai dengan peningkatan PAD, berkurangnya angka pengangguran,**



berkembangnya sector riil di luar pertambangan, munculnya ekonomi kreatif, *start up* dan *market place* di era revolusi industry 4.0

3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel dan bebas korupsi, dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan dan pengawasan kebijakan
4. Mewujudkan masyarakat religius, mengedepankan nilai-nilai agama dan memegang teguh tradisi dan adat istiadat sebagai warisan leluhur dan identitas bangsa
5. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang mantap, modern, nyaman dan ramah lingkungan dalam konsep SMART CITY yang dicirikan pemanfaatan teknologi informasi.

Adapun yang menjadi fokus DPMPTSP Kota Samarinda adalah misi ke-2 misi ke-3 dan misi ke-5.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi

A. Telaahan Renstra Badan Koordinasi Penanaman Modal

Berdasarkan amanat peraturan dan undang – undang terhadap tugas dan fungsi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), visi BKPM adalah sebagai berikut :

BKPM yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong.”

Sesuai dengan visi 2020-2024, maka misi BKPM yang mengacu pada 2 (dua) dari 9 (sembilan) Misi Presiden dan Wakil Presiden, sebagai berikut :

1. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
2. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya.

Dengan mempertimbangkan potensi dan permasalahan yang akan dihadapi serta dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden, maka tujuan BKPM Tahun 2020-2024, yaitu:

1. Terwujudnya peningkatan daya saing penanaman modal untuk menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan penanaman modal; serta
2. Terwujudnya tata kelola dan penguatan kelembagaan untuk mendukung pelayanan publik yang prima.



B. Telaahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur

Adapun Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2018-2023 adalah :

“Berani untuk Kalimantan Timur Berdaulat.”

Dalam rangka mewujudkan visi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur 2018-2023, ditetapkan misi pembangunan dalam lima tahun mendatang yaitu:

1. Berdaulat dalam pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia dan berdaya saing, terutama perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas;
2. Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan;
3. Berdaulat dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur kewilayahan;
4. Berdaulat dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan;
5. Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana tata ruang wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman didalam melaksanakan kegiatan yang menggunakan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Penerapan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) dalam penataan ruang juga bermanfaat untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) serta instrumen pengelolaan lingkungan lainnya, menciptakan tata pengaturan yang lebih baik melalui pembangunan keterlibatan para pemangku kepentingan yang strategis dan partisipatif, kerjasama lintas batas wilayah administrasi, serta memperkuat pendekatan kesatuan.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Samarinda Tahun 2014-2034, adapun tujuan Penataan Ruang adalah untuk mewujudkan Kota Samarinda menjadi kota tepian yang berbasis perdagangan, jasa dan industri yang maju, berwawasan lingkungan dan hijau, serta mempunyai keunggulan daya saing untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun Kebijakan Penataan Ruang Meliputi :



1. Meningkatkan akses pelayanan regional dan internasional sebagai Pusat Kegiatan Nasional yang merupakan bagian dari kawasan perkotaan Balikpapan - Tenggarong - Samarinda - Bontang dan sebagai bagian dari Kapet Sasamba.
2. Perwujudan pusat-pusat pelayanan kota yang bersinergi, efektif, dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi daerah sebagai kota tepian.
3. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan infrastruktur perkotaan yang terpadu dan merata di seluruh wilayah kota.
4. Peningkatan peran kota tepian yang ditunjang oleh kegiatan industri, pertanian, perikanan, perdagangan/jasa, dan pariwisata.
5. Pemantapan kelestarian kawasan lindung untuk mendukung pembangunan kota yang berkelanjutan.
6. Pengembangan kegiatan budidaya untuk mendukung pelaksanaan pembangunan kota yang berwawasan lingkungan dan hijau, serta mempunyai keunggulan daya saing untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
7. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telahaan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, Isu strategis jangka menengah DPMPTSP Kota Samarinda adalah sebagai berikut:

1. Potensi Kota Samarinda sebagai Kota Jasa dan Perdagangan;
2. Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
3. Penerapan OSS.



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Dalam mewujudkan Visi melalui pelaksanaan Misi yang telah ditetapkan tersebut diatas, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Perumusan tujuan dan sasaran DPMPTSP Kota Samarinda Tahun 2021-2026 dikelompokkan berdasarkan Misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

Tujuan jangka menengah DPMPTSP Kota Samarinda tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Meningkatnya Jumlah dan Nilai Investasi;
2. Meningkatnya Pelayanan Prima Bagi Masyarakat.

Sedangkan Sasaran dari Tujuan Jangka Menengah yaitu :

1. Meningkatkan Pertumbuhan Investasi;
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah DPMPTSP Kota Samarinda kinerjanya disajikan pada Tabel berikut ini :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPMPTSP Kota Samarinda tahun 2021-2026

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Indikator Kinerja Sasaran				
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya Jumlah dan Nilai Investasi	Meningkatnya Nilai Investasi	Nilai Investasi	950 Milyar (Rp)	1 Triliun (Rp)	1,1 Triliun (Rp)	1,2 Triliun (Rp)	1,3 Triliun (Rp)	1,4 Triliun (Rp)



No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Indikator Kinerja Sasaran				
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Perizinan dan Non Perizinan	Nilai Rata-Rata Indeks Survei Kepuasan Masyarakat	89	90	91	92	93	94



BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, DPMPTSP Kota Samarinda memiliki Strategi dan yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran, yaitu sebagai berikut:

1. Peningkatan Kebijakan Penanaman Modal dengan menciptakan Iklim Investasi yang kondusif dan dapat menarik minat Investor;
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan yang Profesional.

Sedangkan Arah kebijakan yang ditempuh oleh DPMPTSP Kota Samarinda adalah sebagai berikut:

1. Memberikan kemudahan bidang Penanaman Modal dan Percepatan Berusaha;
2. Memberikan Kepastian Hukum dan kemudahan dalam Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif

Rencana program prioritas selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan jangka menengah DPMPTSP yang telah ditetapkan. Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DPMPTSP Kota Samarinda tahun 2021-2026 meliputi:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

1.1 Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- 1.1.3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- 1.1.4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- 1.1.5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
- 1.1.6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 1.1.7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 1.2.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- 1.2.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

1.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- 1.3.1 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
- 1.3.2 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
- 1.3.3 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD

1.4 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah

- 1.4.1 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah
- 1.4.2 Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah



- 1.4.3 Pengolahan Data Retribusi Daerah
- 1.4.4 Penetapan Wajib Retribusi Daerah
- 1.4.5 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah

1.5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- 1.5.1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
- 1.5.2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan
- 1.5.3 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
- 1.5.4 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
- 1.5.5 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
- 1.5.6 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 1.5.7 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

1.6 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- 1.6.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 1.6.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 1.6.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 1.6.4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 1.6.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- 1.6.6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 1.6.7 Penyediaan Bahan/Material
- 1.6.8 Fasilitasi Kunjungan Tamu
- 1.6.9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 1.6.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

1.7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 1.7.1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 1.7.2 Pengadaan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan
- 1.7.3 Pengadaan Mebel
- 1.7.4 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 1.7.5 Pengadaan Aset Tetap Lainnya
- 1.7.6 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 1.7.7 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

1.8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1.8.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 1.8.2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor



1.8.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.9.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan

1.9.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan

1.9.3 Pemeliharaan Mebel

1.9.4 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

1.9.5 Pemeliharaan Aset tetap lainnya

1.9.6 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

1.9.7 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

1.9.8 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

2.1 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

2.1.1 Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

2.1.2 Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

2.2 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota

2.2.1 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

2.2.2 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota

3. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL

3.1 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

3.1.1 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal

3.1.2 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota



4. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL

4.1 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

- 4.1.1 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
- 4.1.2 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal
- 4.1.3 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan
- 4.1.4 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah

5. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

5.1 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

- 5.1.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
- 5.1.2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
- 5.1.3 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

6. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

6.1 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- 6.1.1 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Berikut adalah Tabel Program dan Kegiatan Prioritas Renstra DPMPTSP Kota Samarinda Tahun 2021-2026.



Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatorif Tahun 2021-2026
DPMPTSP Kota Samarinda

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi	
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target			Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Meningkatnya Jumlah dan Nilai Investasi	Meningkatkan Pertumbuhan Investasi	Nilai Investasi	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Nilai Realiasi Investasi	950 M	1 T	1,388,000,000	1,1 T	1,120,640,000	1,2 T	1,154,258,000	1,3 T	1,188,875,000	1,4 T	1,224,549,000	6 T	6,076,322,000	DPM PTSP	Smd
			1. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perda	-	1 Perda	583,000,000	-	291,490,000	-	300,234,000	-	309,240,000	-	318,518,000	1 Perda	1,802,482,000	DPM PTSP	Smd
			1.1 Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Perda	-	1 Perda	300,000,000	-	0	-	0	-	0	-	0	1 Perda	300,000,000	DPM PTSP	Smd
			1.2 Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan yang dievaluasi	-			50 Perusahaan	283,000,000	50 Perusahaan	300,234,000	50 Perusahaan	309,240,000	50 Perusahaan	318,518,000	50 Perusahaan	1,502,482,000	DPM PTSP	Smd
			2. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	805,000,000	2 Dokumen	829,150,000	2 Dokumen	854,024,000	2 Dokumen	879,635,000	2 Dokumen	906,031,000	10 Dokumen	4,273,840,000	DPM PTSP	Smd
			2.1 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen	-	1 Dokumen	245,000,000	1 Dokumen	252,350,000	1 Dokumen	259,920,000	1 Dokumen	267,710,000	1 Dokumen	275,749,000	5 Dokumen	1,300,729,000	DPM PTSP	Smd



*Rancangan Rencana Strategis
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
2021-2026*

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			2.2 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	560,000,000	1 Dokumen	576,800,000	1 Dokumen	594,104,000	1 Dokumen	611,925,000	1 Dokumen	630,282,000	5 Dokumen	2,973,111,000	DPM PTSP	Smd
			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor	2	5	893,241,000	5	920,037,000	6	947,637,000	7	970,909,000	8	995,496,000	31	4,727,320,000	DPM PTSP	Smd
			1. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Promosi yang diselenggarakan	4	5	893,241,000	5	920,037,000	5	947,637,000	5	970,909,000	5	995,496,000	25	4,727,320,000	DPM PTSP	Smd
			1.1 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah dokumen	-	1	204,221,000	1	210,347,000	1	216,657,000	1	218,000,000	1	220,000,000	5	1,069,225,000	DPM PTSP	Smd
			1.2 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Promosi	4	5 Event	689,020,000	5 Event	709,690,000	5 Event	730,980,000	5 Event	752,909,000	5 Event	775,496,000	25 Event	3,658,095,000	DPM PTSP	Smd
			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Izin Terbit yang Efektif	2500	2550	834,902,000	2600	859,948,000	2650	1,285,746,000	2700	1,324,317,000	2750	1,364,046,000	15750	5,668,959,000	DPM PTSP	Smd
			1. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Izin Terbit	3500	3550	834,902,000	3600	859,948,000	3650	1,285,746,000	3700	1,324,317,000	3750	1,364,046,000	21750	5,668,959,000	DPM PTSP	Smd
			1.1 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan	Jumlah Masyarakat / Pelaku Usaha	5000	5100	314,902,000	5200	324,348,000	5300	334,078,000	5400	344,100,000	5500	354,423,000	26500	1,671,851,000	DPM PTSP	Smd



*Rancangan Rencana Strategis
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
2021-2026*

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Berusaha Terintegrasi secara Elektronik																
			1.2 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha	100	200	250,000,000	220	257,500,000	240	265,225,000	260	273,181,000	280	281,376,000	1200	1,327,282,000	DPM PTSP	Smd
			1.3 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti	40	40	270,000,000	40	278,100,000	40	286,443,000	40	295,036,000	40	303,887,000	200	1,433,466,000	DPM PTSP	Smd
			1.4 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah ketetapan	-	-	-	-	-	100	400,000,000	125	412,000,000	150	424,360,000	375	1,236,360,000	DPM PTSP	Smd
			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah LKPM yang Masuk	300	300	355,000,000	300	365,650,000	300	376,619,000	300	387,916,000	300	399,553,000	300	1,884,738,000	DPM PTSP	Smd
			1. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian	200	200	355,000,000	200	365,650,000	200	376,619,000	200	387,916,000	200	399,553,000	200	1,884,738,000	DPM PTSP	Smd
			1.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan	30	30	155,000,000	50	159,650,000	50	164,439,000	50	169,372,000	50	174,453,000	50	822,914,000	DPM PTSP	Smd



*Rancangan Rencana Strategis
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
2021-2026*

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			1.2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan	50	50	100,000,000	50	103,000,000	50	106,090,000	50	109,272,000	50	112,550,000	50	530,912,000	DPM PTSP	Smd
			1.3 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan	100	100	100,000,000	100	103,000,000	100	106,090,000	100	109,272,000	100	112,550,000	100	530,912,000	DPM PTSP	Smd
			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Jumlah Pengguna Layanan Data	3500	4000	385,000,000	4100	396,550,000	4200	408,446,000	4300	420,699,000	4400	433,320,000	24500	2,044,015,000	DPM PTSP	Smd
			1. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sistem Aplikasi	8	1	385,000,000	1	396,550,000	1	408,446,000	1	420,699,000	1	433,320,000	14	2,044,015,000	DPM PTSP	Smd
			1.1 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Database yang diarsipkan	3000	4000	385,000,000	5000	396,550,000	5000	408,446,000	5000	420,699,000	5000	433,320,000	24000	2,044,015,000	DPM PTSP	Smd



*Rancangan Rencana Strategis
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
2021-2026*

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Meningkatnya Pelayanan Prima Bagi Masyarakat	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai IKM	89	90	32,103,233,000	91	30,148,540,000	92	30,803,440,000	93	31,690,403,000	94	31,307,033,000	94	156,052,649,000	DPM PTSP	Smd
			1. Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	80	80	100,000,000	82	103,000,000	83	106,088,000	84	109,268,000	85	112,541,000	85	530,897,000	DPM PTSP	Smd
			- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan	5 Dokumen	5 Dokumen	30,000,000	5 Dokumen	30,900,000	8 Dokumen	31,827,000	5 Dokumen	32,781,000	8 Dokumen	33,764,000	31 Dokumen	159,272,000	DPM PTSP	Smd
			- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	1 Dokumen	5,150,000	1 Dokumen	5,304,000	1 Dokumen	5,463,000	1 Dokumen	5,626,000	5 Dokumen	26,543,000	DPM PTSP	Smd
			- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	1 Dokumen	5,150,000	1 Dokumen	5,304,000	1 Dokumen	5,463,000	1 Dokumen	5,626,000	5 Dokumen	26,543,000	DPM PTSP	Smd
			- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	1 Dokumen	5,150,000	1 Dokumen	5,304,000	1 Dokumen	5,463,000	1 Dokumen	5,626,000	5 Dokumen	26,543,000	DPM PTSP	Smd
			- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	1 Dokumen	5,150,000	1 Dokumen	5,304,000	1 Dokumen	5,463,000	1 Dokumen	5,626,000	5 Dokumen	26,543,000	DPM PTSP	Smd
			- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LAKIP	1 Dokumen	1 Dokumen	30,000,000	1 Dokumen	30,900,000	1 Dokumen	31,827,000	1 Dokumen	32,781,000	1 Dokumen	33,764,000	5 Dokumen	159,272,000	DPM PTSP	Smd
			- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi	4 Dokumen	4 Dokumen	20,000,000	4 Dokumen	20,600,000	4 Dokumen	21,218,000	4 Dokumen	21,854,000	4 Dokumen	22,509,000	20 Dokumen	106,181,000	DPM PTSP	Smd
			2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	7 Laporan	7 Laporan	14,046,033,000	7 Laporan	14,467,413,000	7 Laporan	14,901,435,000	7 Laporan	17,008,081,000	7 Laporan	15,782,176,000	7 Laporan	76,205,138,000	DPM PTSP	Smd



*Rancangan Rencana Strategis
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
2021-2026*

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab	Lokasi	
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target			Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN yang di bayarkan	73 Orang	73 Orang	12,821,174,000	73 Orang	13,205,809,000	73 Orang	13,601,983,000	73 Orang	15,381,222,000	73 Orang	15,584,217,000	73 Orang	70,594,405,000	DPM PTSP	Smd
			- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Gaji dan Tunjangan Non ASN yang di bayarkan	48 Orang	48 Orang	1,199,859,000	48 Orang	1,235,854,000	48 Orang	1,272,930,000	48 Orang	1,599,859,000	48 Orang	169,959,000	48 Orang	5,478,461,000	DPM PTSP	Smd
			- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan	7 Laporan	7 Laporan	25,000,000	7 Laporan	25,750,000	7 Laporan	26,522,000	7 Laporan	27,000,000	7 Laporan	28,000,000	35 Laporan	132,272,000	DPM PTSP	Smd
			3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100,000,000	3 Laporan	100,000,000	3 Laporan	75,000,000	3 Laporan	75,000,000	3 Laporan	75,000,000	3 Laporan	425,000,000	DPM PTSP	Smd
			- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan	1 Laporan	1 Laporan	50,000,000	1 Laporan	50,000,000	1 Laporan	25,000,000	1 Laporan	25,000,000	1 Laporan	25,000,000	1 Laporan	175,000,000	DPM PTSP	Smd
			- Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan	1 Laporan	1 Laporan	25,000,000	1 Laporan	25,000,000	1 Laporan	25,000,000	1 Laporan	25,000,000	1 Laporan	25,000,000	1 Laporan	125,000,000	DPM PTSP	Smd
			- Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan	1 Laporan	1 Laporan	25,000,000	1 Laporan	25,000,000	1 Laporan	25,000,000	1 Laporan	25,000,000	1 Laporan	25,000,000	1 Laporan	125,000,000	DPM PTSP	Smd
			4. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	250,000,000	5 Dokumen	250,000,000	5 Dokumen	250,000,000	5 Dokumen	250,000,000	5 Dokumen	250,000,000	5 Dokumen	1,250,000,000	DPM PTSP	Smd
			- Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	250,000,000	DPM PTSP	Smd
			- Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	250,000,000	DPM PTSP	Smd
			- Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	250,000,000	DPM PTSP	Smd



*Rancangan Rencana Strategis
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
2021-2026*

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			- Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	250,000,000	DPM PTSP	Smd
			- Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan	1 Laporan	1 Laporan	50,000,000	1 Laporan	50,000,000	1 Laporan	50,000,000	1 Laporan	50,000,000	1 Laporan	50,000,000	1 Laporan	250,000,000	DPM PTSP	Smd
			5. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai	121 Orang	121 Orang	1,304,200,000	121 Orang	561,826,000	121 Orang	612,917,000	121 Orang	617,054,000	121 Orang	621,316,000	121 Orang	3,717,313,000	DPM PTSP	Smd
			- Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Sarana dan Prasarana	121 Orang	121 Orang	1,304,200,000	121 Orang	561,826,000	121 Orang	612,917,000	121 Orang	617,054,000	121 Orang	621,316,000	121 Orang	3,717,313,000	DPM PTSP	Smd
			- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas dan Kelengkapannya	-	10 Jenis	150,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	10 Jenis	150,000,000	DPM PTSP	Smd
			- Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen	-	73 Orang	79,200,000	73 Orang	81,576,000	73 Orang	137,917,000	73 Orang	142,054,000	73 Orang	146,316,000	73 Orang	587,063,000	DPM PTSP	Smd
			- Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen	-	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	51,500,000	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	251,500,000	DPM PTSP	Smd
			- Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen	-	1 Dokumen	75,000,000	1 Dokumen	77,250,000	1 Dokumen	75,000,000	1 Dokumen	75,000,000	1 Dokumen	75,000,000	1 Dokumen	377,250,000	DPM PTSP	Smd
			- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang diikutsertakan	-	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	51,500,000	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	251,500,000	DPM PTSP	Smd
			- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yang diikutsertakan	5 orang	121 orang	900,000,000	30 orang	300,000,000	30 orang	300,000,000	30 orang	300,000,000	30 orang	300,000,000	30 orang	2,100,000,000	DPM PTSP	Smd
			6. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	10 Laporan	10 Laporan	6,016,000,000	10 Laporan	6,016,000,000	10 Laporan	6,066,000,000	10 Laporan	4,784,000,000	10 Laporan	4,804,000,000	10 Laporan	27,686,000,000	DPM PTSP	Smd
			- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	3 Jenis	3 Jenis	1,300,000,000	3 Jenis	1,300,000,000	3 Jenis	1,300,000,000	3 Jenis	13,000,000	3 Jenis	13,000,000	3 Jenis	3,926,000,000	DPM PTSP	Smd



*Rancangan Rencana Strategis
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
2021-2026*

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	15 Jenis	15 Jenis	1,500,000,000	15 Jenis	1,500,000,000	15 Jenis	1,500,000,000	15 Jenis	1,500,000,000	15 Jenis	1,500,000,000	15 Jenis	7,500,000,000	DPM PTSP	Smd
			- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga	10 Jenis	10 Jenis	500,000,000	10 Jenis	500,000,000	10 Jenis	500,000,000	10 Jenis	500,000,000	10 Jenis	500,000,000	10 Jenis	2,500,000,000	DPM PTSP	Smd
			- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik	15 Jenis	15 Jenis	200,000,000	15 Jenis	200,000,000	15 Jenis	200,000,000	15 Jenis	200,000,000	15 Jenis	200,000,000	15 Jenis	1,000,000,000	DPM PTSP	Smd
			- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan	15 Jenis	15 Jenis	483,000,000	15 Jenis	483,000,000	15 Jenis	483,000,000	15 Jenis	483,000,000	15 Jenis	483,000,000	15 Jenis	2,415,000,000	DPM PTSP	Smd
			- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10 Jenis	10 Jenis	150,000,000	10 Jenis	150,000,000	10 Jenis	150,000,000	10 Jenis	150,000,000	10 Jenis	150,000,000	10 Jenis	750,000,000	DPM PTSP	Smd
			- Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan material yang disediakan	10 Bahan	10 Bahan	250,000,000	10 Bahan	250,000,000	10 Bahan	250,000,000	10 Bahan	250,000,000	10 Bahan	250,000,000	10 Bahan	1,250,000,000	DPM PTSP	Smd
			- Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Rombongan Tamu Yang Berkunjung	20 Kunjungan	20 Kunjungan	8,000,000	20 Kunjungan	58,000,000	20 Kunjungan	58,000,000	20 Kunjungan	58,000,000	20 Kunjungan	58,000,000	20 Kunjungan	290,000,000	DPM PTSP	Smd
			- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah SPPD	50 SPPD	150 SPPD	1,500,000,000	150 SPPD	1,500,000,000	150 SPPD	1,500,000,000	150 SPPD	1,500,000,000	150 SPPD	1,500,000,000	150 SPPD	7,500,000,000	DPM PTSP	Smd
			- Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	jumlah arsip dinamis	400 Arsip	500 Arsip	5,000,000	600 Arsip	75,000,000	700 Arsip	125,000,000	800 Arsip	130,000,000	900 Arsip	150,000,000	1000 Arsip	555,000,000	DPM PTSP	Smd
			7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan Rencana Kebutuhan Barang	7 Laporan	7 Laporan	5,470,000,000	7 Laporan	3,800,000,000	7 Laporan	3,860,000,000	7 Laporan	3,860,000,000	7 Laporan	4,620,000,000	7 Laporan	21,610,000,000	DPM PTSP	Smd
			- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan	7 Laporan	7 Laporan	5,470,000,000	7 Laporan	3,800,000,000	7 Laporan	3,860,000,000	7 Laporan	3,860,000,000	7 Laporan	4,620,000,000	7 Laporan	21,610,000,000	DPM PTSP	Smd
			- Pengadaan Kendaraan Dinas	Jumlah Pengadaan	-	7 Unit	800,000,000	7 Unit	800,000,000	7 Unit	800,000,000	7 Unit	800,000,000	7 Unit	800,000,000	7 Unit	4,000,000,000	DPM PTSP	Smd



*Rancangan Rencana Strategis
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
2021-2026*

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab	Lokasi	
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD				
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
			Oprasional atau Lapangan	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																
			- Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel	-	4 Unit	1,520,000,000	-	-	-	-	-	-	4 Unit	760,000,000	4 Unit	2,280,000,000	DPM PTSP	Smd	
			- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin	-	4 Unit	150,000,000	-	-	2 Unit	60,000,000	2 Unit	60,000,000	2 Unit	60,000,000	10 Unit	330,000,000	DPM PTSP	Smd	
			- Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset tetap Berwujud		15 Unit	1,750,000,000	15 Unit	1,750,000,000	15 Unit	1,750,000,000	15 Unit	1,750,000,000	15 Unit	1,750,000,000					
			- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung		5 Unit	500,000,000	5 Unit	500,000,000	5 Unit	500,000,000	5 Unit	500,000,000	5 Unit	500,000,000					
			8. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Penyediaan Jasa	3 Laporan	3 Laporan	1,928,700,000	3 Laporan	1,952,001,000	3 Laporan	2,028,700,000	3 Laporan	2,078,700,000	3 Laporan	2,128,700,000	3 Laporan	10,116,801,000	DPM PTSP	Smd	
			- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tagihan Rekening yang di bayarkan	3 Laporan	3 Laporan	1,928,700,000	3 Laporan	1,952,001,000	3 Laporan	2,028,700,000	3 Laporan	2,078,700,000	3 Laporan	2,128,700,000	3 Laporan	10,116,801,000	DPM PTSP	Smd	
			- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Tagihan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36 Bukti Pembayar an	36 Bukti Pembaya ran	1,152,000,000	36 Bukti Pembaya ran	1,152,000,000	36 Bukti Pembaya ran	1,152,000,000	36 Bukti Pembaya ran	1,152,000,000	36 Bukti Pembaya ran	1,152,000,000	36 Bukti Pembaya ran	5,760,000,000	DPM PTSP	Smd	
			- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tagihan Jasa Pelayanan Umum	-	10 Bukti Pembaya ran	560,000,000	10 Bukti Pembaya ran	576,800,000	10 Bukti Pembaya ran	560,000,000	10 Bukti Pembaya ran	560,000,000	10 Bukti Pembaya ran	560,000,000	10 Bukti Pembaya ran	2,816,800,000	DPM PTSP	Smd	
			9. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Pemeliharaan	8 Laporan	8 Laporan	2,888,300,000	8 Laporan	2,898,300,000	8 Laporan	2,903,300,000	8 Laporan	2,908,300,000	8 Laporan	2,913,300,000	8 Laporan	14,511,500,000	DPM PTSP	Smd	
			- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas	8 Laporan	8 Laporan	2,888,300,000	8 Laporan	2,898,300,000	8 Laporan	2,903,300,000	8 Laporan	2,908,300,000	8 Laporan	2,913,300,000	8 Laporan	14,511,500,000	DPM PTSP	Smd	



*Rancangan Rencana Strategis
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
2021-2026*

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan																
			- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	8 Unit	8 Unit	986,800,000	15 Unit	986,800,000	17 Unit	986,800,000	17 Unit	986,800,000	17 Unit	986,800,000	17 Unit	4,934,000,000	DPM PTSP	Smd
			- Pemeliharaan Mebel	Jumlah Pemeliharaan Mebel	7 Unit	7 Unit	716,500,000	9 Unit	716,500,000	9 Unit	716,500,000	9 Unit	716,500,000	9 Unit	716,500,000	9 Unit	3,582,500,000	DPM PTSP	Smd
			- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan peralatan dan Mesin	30 Unit	30 Unit	0,000,000	30 Unit	40,000,000	30 Unit	45,000,000	30 Unit	50,000,000	30 Unit	55,000,000	30 Unit	220,000,000	DPM PTSP	Smd
			- Pemeliharaan Aset tetap lainnya	Jumlah Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	60 Unit	60 Unit	55,000,000	10 Jenis	55,000,000	10 Jenis	55,000,000	10 Jenis	55,000,000	10 Jenis	55,000,000	10 Jenis	275,000,000	DPM PTSP	Smd
			- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Milik Sendiri/Sewa yang terpelihara	1 Unit	1 Unit	250,000,000	1 Unit	250,000,000	1 Unit	250,000,000	1 Unit	250,000,000	1 Unit	250,000,000	1 Unit	1,250,000,000	DPM PTSP	Smd
			- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas	1 Gedung	1 Gedung	350,000,000	1 Gedung	350,000,000	1 Gedung	350,000,000	1 Gedung	350,000,000	1 Gedung	350,000,000	1 Gedung	1,750,000,000	DPM PTSP	Smd
			- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas	5 jenis	5 jenis	250,000,000	5 jenis	250,000,000	5 jenis	250,000,000	5 jenis	250,000,000	5 jenis	250,000,000	5 jenis	1,250,000,000	DPM PTSP	Smd



BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Indikator kinerja DPMPTSP Kota Samarinda tahun 2021-2026 yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Samarinda adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai DPMPTSP Kota Samarinda tahun 2021-2026 dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021-2026. Indikator kinerja DPMPTSP Kota Samarinda yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021-2026 ini menjadi tolok ukur kinerja dalam evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di DPMPTSP Kota Samarinda. Indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur.

Sebagaimana tercantum dalam Rancangan Awal RPJMD, indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda tahun 2021-2026 yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rancangan Awal RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Jumlah Nilai Realisasi Investasi	950 M	1 T	1,1 T	1,2 T	1,3 T	1,4 T	1,4 T
2	Indeks Survey Kepuasan Masyarakat	88 %	89 %	90 %	91 %	92 %	93 %	94 %



BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda tahun 2021-2026 merupakan rencana pembangunan selama 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi kebijakan, program dan kegiatan. Penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda Tahun 2021-2026 dan bersifat indikatif. Renstra dimaksudkan untuk memberi arah dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh DPMPTSP Kota Samarinda dalam kurun waktu lima tahun.

Kaidah pelaksanaan yang perlu diatur dalam pelaksanaan Renstra DPMPTSP Kota Samarinda tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Seluruh unit dan jabatan pada DPMPTSP Kota Samarinda agar mendukung pencapaian target-target Renstra tahun 2021-2026, dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra DPMPTSP dengan sebaik-baiknya;
2. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) DPMPTSP dalam kurun waktu 5 (lima) tahun wajib berpedoman pada Renstra DPMPTSP Kota Samarinda tahun 2021-2026;
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra DPMPTSP Kota Samarinda tahun 2021-2026, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
4. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau perubahan kebijakan Kota Samarinda, maka dapat dilakukan perubahan Renstra DPMPTSP Kota Samarinda tahun 2021-2026 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.



LAMPIRAN

**Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Kebijakan Renstra
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu
Kota Samarinda**

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan Tim Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Dan Penyusunan Agenda Kerja	√			
2.	Penyiapan Data Dan Informasi	√			
3.	Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	√			
4.	Review Renstra K/L Dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi	√			
5.	Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota	√			
6.	Analisis Terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Sesuai Dengan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	√			
7.	Perumusan Isu-Isu Strategis	√			
8.	Perumusan Visi dan Misi Perangkat Daerah kabupaten/Kota	√			
9.	Perumusan Visi Dan Misi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Berpedoman Pada Visi Dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah	√			
10.	Perumusan Tujuan Pelayanan Jangka Menengah Perangkat Daerah kabupaten/Kota	√			
11.	Perumusan Sasaran Pelayanan Jangka Menengah Perangkat Daerah/Kota	√			
12.	Mempelajari Surat Edaran Bupati/Walikota perihal Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota beserta lampirannya yaitu rancangan awal RPJMD kabupaten/Kota yang memuat indicator keluaran Program dan Pagu Per-Perangkat Daerah	√			
13.	Perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah Kabupaten/Kota guna mencapai target	√			

	kinerja program prioritas RPJMD Kabupaten/Kota yang menjadi tugas dan fungsi perangkat Daerah Kabupaten/Kota				
14.	Perumusan Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan	√			
15.	Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten/Kota	√			
16.	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	√			
17.	Perumusan Indikator Kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah Kabupaten/Kota berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah	√			
18.	Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah kabupaten/Kota	√			
19.	Pentahapan pelaksanaan program Perangkat Daerah kabupaten/Kota sesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota.	√			
20.	Dokumen Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang telah disahkan	√			

Samarinda, 22 September 2021

Kepala DPMPTSP
Kota Samarinda



Jesmanah Andhana alus, SH, M.Si
33 NIP. 19711030 199403 1 002